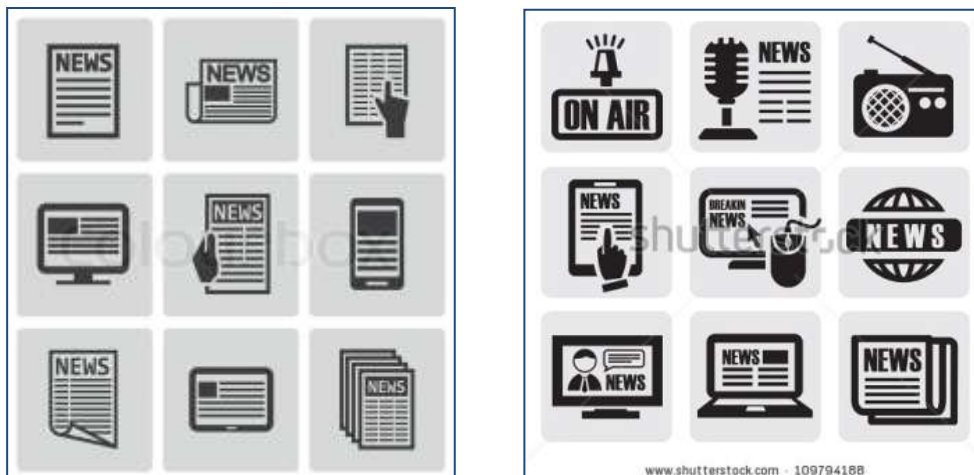




e-Newspaper Media Online

Sarana & Prasarana

Kamis, 27 April 2017



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional
Jakarta, Bappenas
2017**

Daftar Isi

1. HAPUSKAN ORIENTASI PROYEK (*Media Online Kompas*)

Hapuskan Orientasi Proyek

Presiden Minta Susun Prioritas

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pemangku kepentingan di pusat dan daerah agar merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi. Oleh karena itu, mental aparatur pemerintah yang berorientasi proyek harus dihapuskan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah kementerian dan lembaga negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Birokrasi dalam instansi tersebut adalah pihak yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang mayoritas dibiayai dari pajak dan utang.

Presiden dalam pidato pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2017 di Jakarta, Rabu (26/4), mengatakan, banyak proyek yang setelah selesai dibangun tidak dapat berfungsi. Sebab, proyek dibangun secara parsial.

Misalnya, waduk yang tidak dilengkapi dengan jaringan irigasi. Contoh lain, pelabuhan tanpa dilengkapi jalan. Hal-hal seperti ini banyak dan sudah eksis selama bertahun-tahun.

"Artinya tidak terkonsolidasi dan tidak terintegrasi dengan baik antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Berarti apa? Orientasinya hanya proyek sehingga tidak menghasilkan *output* atau *outcome*," kata Presiden.

Tetapkan prioritas

Agar hasil pembangunan lebih

optimal, Presiden juga meminta kepada semua pemangku kepentingan di pemerintahan untuk menetapkan prioritas pembangunan. Selanjutnya, alokasi anggaran mengikuti prioritas yang disusun.

"Saya ingin ingatkan, anggaran kita sudah bertahun-tahun tidak pernah fokus. Perencanaan tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas," kata Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden menyarankan sebaiknya maksimal 3-5 prioritas.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 sangat kritikal. Sebab, sebagian besar target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 harus terealisasi pada akhir 2018.

Meski demikian, Bambang menekankan, pelambatan pertumbuhan ekonomi global maupun domestik mau tidak mau menyebabkan target awal menjadi tidak realistis lagi, misalnya pertumbuhan ekonomi sebagai asumsi ekonomi makro. Karena itu, penyesuaian akan dilakukan.

(LAS)

HAPUSKAN ORIENTASI PROYEK

Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pemangku kepentingan di pusat dan daerah agar merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi. Oleh karena itu, mental aparatur pemerintah yang berorientasi proyek harus dihapuskan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah kementerian dan lembaga negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Birokrasi dalam instansi tersebut adalah pihak yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang mayoritas dibiayai dari pajak dan utang

Hashtag Berita :

#Infrastruktur

#PelaksanaanProyekNasional

#KementerianPPN/Bappenas

#MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia

#MusrenbangNas #RPJMN

#RencanaKerjaPemerintah